PEMKAB SINJAI GANDENG OMBUDSMAN PERKUAT PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Rabu, 25 November 2026 - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan

SINJAI, SOLUSINEWS.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan melalui workshop bersama Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (24/11/2026). CariPeta Wilayah

Kegiatan yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sinjai tersebut dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa.

Workshop ini turut dihadiri Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Dr. Aswiwin Sirua, serta Asisten Muda II Ombudsman RI Sulsel, Hasrul Eka Putra.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengelolaan pengaduan dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam sambutannya, Andi Jefrianto menegaskan bahwa workshop ini tidak sekadar meningkatkan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga memperkuat komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pengaduan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai beban maupun ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, aduan merupakan sumber informasi, instrumen evaluasi, sekaligus kesempatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

"Aduan masyarakat bukan beban, tetapi kesempatan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Karena pelayanan yang baik adalah wajah pemerintah yang sesungguhnya," ungkapnya.

Ia menambahkan, workshop tersebut juga merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Sinjai dan Ombudsman RI dalam mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari praktik maladministrasi.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Dr. Aswiwin Sirua, mengingatkan agar workshop tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.

Menurutnya, pengetahuan dan materi yang diperoleh peserta harus diwujudkan melalui langkah konkret dalam memperbaiki mekanisme pengelolaan pengaduan di masing-masing instansi.

Ia berharap seluruh perangkat daerah semakin optimal dalam menangani pengaduan masyarakat, mulai dari tahap penerimaan, penanganan, hingga penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Workshop ini berlangsung selama dua hari, 24-25 November 2026. Pesertanya terdiri atas sekretaris perangkat daerah, kepala subbagian umum dan kepegawaian, pengelola pengaduan rumah sakit, serta admin pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik lingkup Pemkab Sinjai. (*)